

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu oleh Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi etika bisnis dan etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan wanita, mahasiswa, dan mahasiswi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian juga untuk mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk etika profesi akuntan. Namun, untuk etika bisnis ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi.

Poniman (2009) meneliti tentang persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dengan akuntan wanita terhadap etika bisnis, tetapi terdapat kecenderungan bahwa akuntan wanita mempunyai persepsi terhadap etika bisnis cenderung lebih baik dibanding dengan akuntan pria. Demikian juga bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dengan akuntan wanita terhadap etika profesi, dan terdapat kecenderungan bahwa akuntan wanita mempunyai persepsi terhadap etika profesi cenderung lebih baik dibanding dengan akuntan pria.

Muhammad (2008) melakukan penelitian tentang persepsi akuntan dan mahasiswa Yogyakarta terhadap etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan independen sample t test menghasilkan t value sebesar 0.016 (signifikan), karena nilai t value < 0.05 maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan dengan mahasiswa., dan hasil pengujian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan, mahasiswa tingkat pertama dan mahasiswa tingkat akhir tidak dapat diterima (hipotesis ditolak). Hasil pengujian dengan man willis diperoleh nilai asym sig sebesar 0.023 (signifikan), karena nilai asym sig < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan, mahasiswa tingkat pertama, dan mahasiswa tingkat akhir terhadap etika bisnis.

Suyatmin (2008) meneliti tentang persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi senior dan mahasiswa akuntansi junior dilihat dari persepsi tentang lingkungan kerja akuntan publik mempunyai perbedaan yang signifikan hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,015 ($P < 0,05$), maka H_0 ditolak H_a diterima. Jika dilihat dari perbedaan mean terlihat bahwa mean mahasiswa akuntansi junior lebih kecil dibandingkan dengan mean mahasiswa akuntansi senior, yaitu mean mahasiswa akuntansi junior 95,06 dan mean untuk mahasiswa akuntansi senior 99,10. Ini berarti bahwa persepsi mahasiswa akuntansi senior terhadap lingkungan kerja akuntan publik lebih baik dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi junior.

Santi novita (2012) melakukan penelitian tentang menguak persepsi etika mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi etika berdasar pilar keadilan, relativisme, dan deontologi antara mahasiswa akuntansi dan non-akuntansi yang menunjukkan bahwa sebagian besar pilar selain deontologi, mahasiswa akuntansi memiliki persepsi etika yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa non-akuntansi. Hasil kedua menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan menunjukkan persepsi etika yang lebih tinggi daripada mahasiswa laki – laki. Dan hasil berikutnya memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang menyatakan dirinya religius dan mahasiswa yang merasa non-religius.

Nuraini dan Kurniawati (2012) penelitian ini meneliti tentang perbedaan persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa prodi akuntan terhadap kode etik ikatan akuntansi indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa prodi akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan akuntan pendidik memiliki pemahaman tentang kode etik yang lebih memadai dibanding mahasiswa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Persepsi

Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi objek, orang dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan atau stimulus yang muncul dari objek,

orang, dan simbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Namun demikian karena persepsi tentang obyek atau peristiwa tersebut tergantung pada suatu kerangka, ruang dan waktu, maka persepsi etika seorang akuntan atau mahasiswa akuntansi juga akan sangat subyektif dan situasional (Hapsari, 2013).

Pengertian persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi obyek, orang, dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari obyek, orang, dan simbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada obyek tertentu, maka masing-masing obyek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat obyek yang sama (Gibson, 1996;134).

2.2.2 Etika

Etika dalam bahasa latin adalah ethica, yang berarti falsafah moral. Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Taufik Akbar

(2009) menyatakan bahwa etika secara harfiah berasal dari kata Yunani, *ethos* (jamaknya *ta etha*) yang artinya sama dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Istilah etika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Taufik Akbar (2009) merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian:

1. Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik.
3. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu hal yang baik dan buruk. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan oleh sekelompok/ golongan manusia/ masyarakat/ profesi.

2.2.3 Etika Bisnis

Etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menetapkan prinsip-prinsip dasar etika dibidang hubungan ekonomi antar manusia. Dan juga dapat dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral dalam hubungan antara berbagai pihak yang terlihat dalam kegiatan bisnis.

Etika Bisnis menurut Sumarni dan Soeprihatno (1995;21) adalah pengetahuan tentang tata cara ideal mengenai pengaturan dan pengelolaan bisnis

yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Etika dalam implementasinya selalu dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama dan budaya mempengaruhi proses perumusan etika bisnis dalam dua hal:

1. Agama dan budaya dianggap sebagai sumber utama hukum, peraturan dan kode etik
2. Agama dan budaya lebih independen dalam etika bisnis dibanding jenis etika bisnis lainnya.

Simorangkir (2001;20) menyatakan bahwa bisnis adalah mencakup segala macam kegiatan untuk memproduksi, menjual, membeli barang-barang, dan jasa demi laba. Yang dimaksud dengan laba adalah penerimaan bisnis yang jumlahnya lebih besar dari pada biaya yang sudah diperhitungkan untuk menghasilkan barang dan jasa. manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, dan kebutuhan itu harus dipenuhi, yaitu berupa kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan. Istilah populernya adalah sandang, pangan, papan dalam bentuk sederhana sampai bentuk mewah canggih dan segala perlengkapannya, semua kebutuhan ini dipenuhi melalui kegiatan bisnis. Jadi salah satu kebutuhan bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. tujuan lain dari bisnis adalah memperoleh keuntungan, sehingga mereka berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnis. Adapun bisnis yang tidak mengejar keuntungan namun mereka perlu bantuan guna menjaga kelangsungan kegiatan bisnisnya seperti bisnis kantor pemerintah yang memberikan layanan jasa untuk masyarakat.

2.2.3.1 Prinsip – Prinsip Etika Bisnis

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Dunia usaha harus diupayakan untuk ditaati atau dilakukan setiap pelaku bisnis yaitu mengenai etika bisnis. Etika bisnis beroperasi pada tingkat individual, organisasi dan sistem.

Keraf (1998) dalam Agoes dan Ardana (2009;127) menjelaskan, bahwa prinsip etika bisnis sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi

Menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, atau ketergantungan kepada pihak lain. Oleh karena itu, syarat mutlak yang harus diciptakan untuk membentuk sikap mandiri adalah mengembangkan suasana kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Namun harus disadari bahwa kebebasan dalam hal ini harus disertai dengan kesadaran akan pentingnya memupuk rasa tanggung jawab. Kebebasan tanpa rasa tanggung jawab akan memunculkan manusia pengecut dan munafik, sedangkan kebebasan disertai tanggung jawab akan menumbuhkan “sikap kesatria”, yaitu sikap berani bertindak diri mengatakan hal yang benar sekaligus berani dan berjiwa besar mengakui suatu kesalahan, serta berani menanggung konsekuensinya.

2. Prinsip Kejujuran

Menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Prinsip kejujuran menjadi prasyarat untuk membangun jaringan bisnis dan kerja tim yang diladasi oleh rasa saling percaya dengan semua mitra usaha dan mitra kerja.

3. Prinsip Keadilan

Menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil (fair), yaitu suatu sikap yang tidak membedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi (menyangkut distribusi pendapatan), aspek hukum (dalam hal perlakuan yang sama di mata hukum), maupun aspek lainnya seperti agama, ras, suku, dan jenis kelamin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hal perekrutan karyawan, promosi jabatan, pemilihan mitra usaha, dan sebagainya.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Prinsip ini melandasi lahirnya konsep stakeholders dalam proses keputusan dan tindakan bisnis.

5. Prinsip Integritas Moral

Adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap

orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Inti dari prinsip integritas moral ini adalah apa yang disebut sebagai the golden rule atau kaidah emas, yaitu: “Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan dan jangan diperlakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin orang lain perlakukan kepada Anda”

2.2.4 Etika Profesi

Hapsari (2013) dalam hal etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.

Etika profesi merupakan etika khusus yang menyangkut dimensi sosial. Etika profesi khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan, yang mana dalam penelitian ini adalah akuntan (Nugraningsih, 2005).

2.2.4.1 Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai - nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang - orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata - rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan

dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Etika Profesi :

Terdapat empat prinsip dari etika profesi menurut Keraf (1998), yaitu :

1. Tanggung jawab.

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

2. Keadilan.

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

3. Otonomi.

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

2.2.4.3 Syarat-syarat suatu Profesi

1. Melibatkan kegiatan intelektual.

2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.

3. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.

4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.

5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

2.2.4.4 Peranan Etika dalam Profesi

Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional.

Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku - perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian

juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

2.2.4.5 Pentingnya etika profesi

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”.

Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran

yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai - nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Hubungan Etika Profesi dengan Gender Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:469-529) dalam Murtanto dan Marini (2003) mendefinisikan jenis adalah sesuatu yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus, sedangkan kelamin adalah jodoh (laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina). Sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk

sebagai jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan, jenis laki-laki atau perempuan (genus). Jadi jenis kelamin adalah makhluk hidup yang terbagi ke dalam kelompok individu yaitu laki - laki (laki-laki) dan perempuan (perempuan).

Menurut Agu Samekti (2000) dalam Nia (2006) istilah gender pada khasanah ilmu-ilmu social diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan gender yang ini merujuk kepada perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.

Menurut Laksmi dan Indrianto (1999) dalam Murtanto dan Marini (2003) perbedaan jenis kelamin sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun pada sebagian besar organisasi ternyata perbedaan gender masih mempengaruhi kesempatan (opportunity) dan kekuasaan (power).

Adanya diskriminasi dalam pekerjaan dapat menurunkan kerja serta prospektif karir perempuan yang disebabkan karena adanya kesempatan yang terbatas dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan hubungan kerja yang dapat mendukung karir mereka.

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis memuat pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat lemah. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan, karena itu masih memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya.

Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam perkataan lain, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuly). Sedangkan etika adalah apakah yang benar dan apakah yang salah dalam hubungan antar manusia, dalam kaitannya dengan moralitas berarti melibatkan pengetahuan individu atau kelompok tentang pemahamannya terhadap kondisi diluar dari manusia itu sendiri. Dari sudut pandang akuntan, beretika merupakan bagian perwujudan sikap profesionalismenya.

Perlunya etika bisnis dan etika profesi akuntan dilakukan oleh para akuntan, karena profesi akuntan aktifitasnya tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika profesinya (Kode Etik Akuntan), akuntan juga harus memahami dan menerapkan etika dalam bisnis.

Berbagai penelitian mengenai persepsi etika bisnis dan etika profesi, memiliki berbagai pandangan yang berbeda menurut para akuntan, karyawan bagian akuntansi, maupun mahasiswa akuntansi. Sehingga penelitian ini meneliti perbedaan berbagai pandangan etika bisnis dan profesi diantara tiga kelompok akuntan yaitu : akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi.

Berdasarkan penelitian - penelitian terdahulu, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji lebih lanjut apakah memang ada atau tidak ada perbedaan persepsi tersebut dengan menguji hipotesis berikut ini :

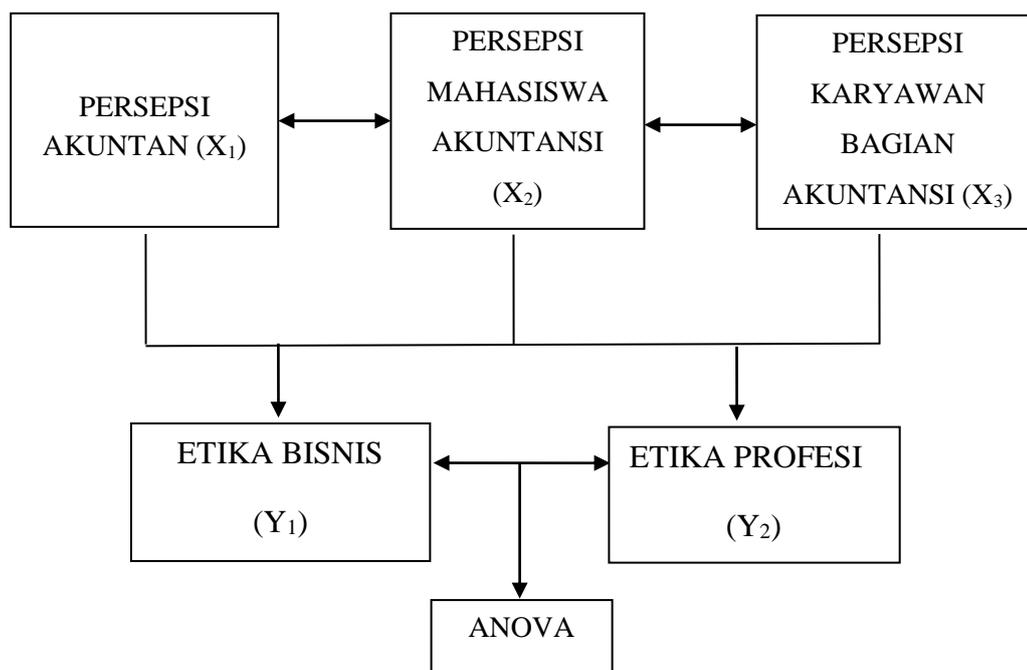
H₁ : terdapat perbedaan persepsi antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika bisnis

H₂ : terdapat perbedaan persepsi antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika profesi

2.4 Rerangka Konseptual

Secara skematis untuk menggambarkan rerangka konseptual dapat digambarkan

Sebagai berikut :



Gambar 2.1

Dalam penelitian ini akan di uji variabel persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi. Untuk menguji perbedaan persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dilakukan dengan menggunakan analisis uji anova.

Dalam rerangka konseptual ini menjelaskan bahwa persepsi akuntan (X₁), persepsi mahasiswa akuntansi (X₂), dan persepsi karyawan bagian akuntansi (X₃) terhadap etika bisnis (Y₁) dan etika profesi (Y₂).

Dengan dasar rerangka konseptual diatas maka dalam menganalisa digunakan Anova karena digunakan untuk menentukan apakah rata – rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata.